

RENSTRA BPBD 2025-2029

RENCANA KERJA

BPBD Nunukan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta HidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 telah disusun dengan merujuk kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 serta memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan memuat misi, tujuan, startegi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan. Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025-2029 yang merupakan penetapan kinerja kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah secara tahunan sampai pada masa berakhirnya jabatan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seuruh komponen Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata sesuai tujuan RPJMD pada Misi ke 4 (empat).

TIM Penyusun

Renstra BPBD 2025-2029

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	19
2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Pelayanan	19
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	31
3.1.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	31
3.1.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029.....	32
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.....	36
3.2.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	36
3.2.2 Matriks Penahapan Renstra PD	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN.....	41
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD.....	41

4.1.1	Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	41
4.1.2	Uraian Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	57
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	59
4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	59
4.2.2	Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	60
BAB V	PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 14

Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2024 18

Tabel 2.3 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020-2024..... 18

Tabel 2.4 : Kelompok Sasaran Layanan Kebencanaan..... 19

Tabel 2.5 : Mitra BPBD dengan Perangkat Daerah 20

Tabel 2.6 : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 22

Tabel 2.7 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD..... 26

Tabel 2.8 : Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 26

Tabel 2.9 : Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD 28

Tabel 3.1 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD..... 34

Tabel 3.2 : Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 35

Tabel 3.3 : Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan 35

Tabel 3.4 : Penahapan Renstra PD 37

Tabel 4.1 : Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan 41

Tabel 4.2 : Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD..... 42

Tabel 4.3 : Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 47

Tabel 4.4 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 56

Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama PD 59

Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Kunci..... 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Restra PD 2

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi 12

Gambar 2.2 : Diagram Jumlah ASN 13

Gambar 3.1 : Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah 32

Gambar 3.2 : Penyajian Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah 33

BAB I

PENDAHULUAN

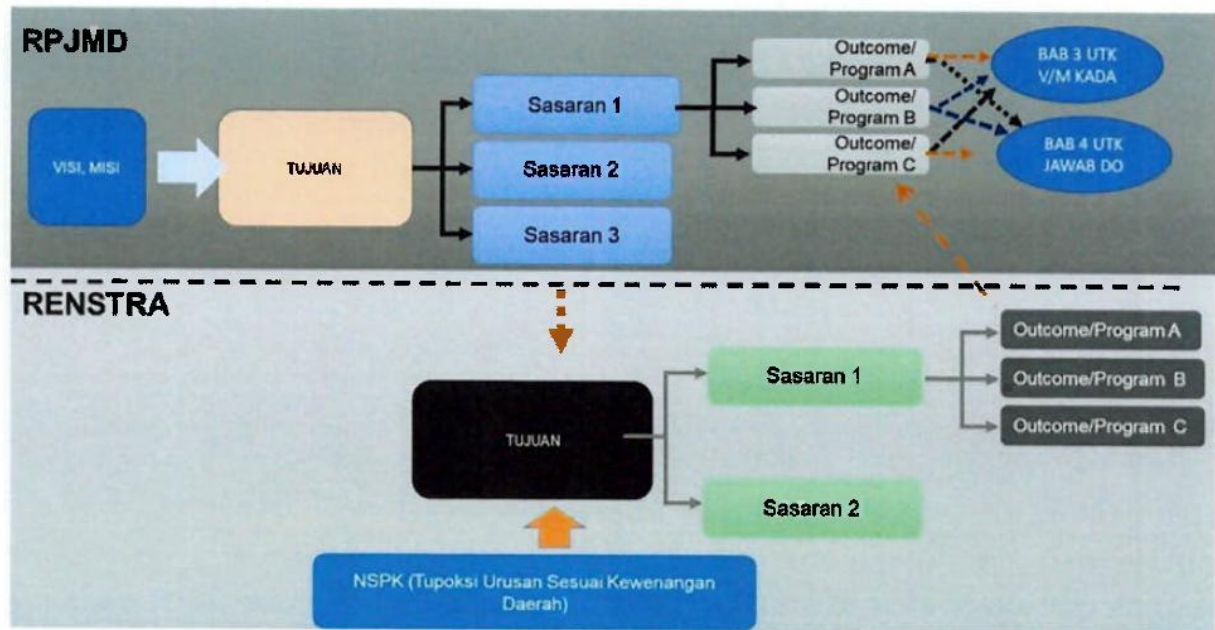
1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan irisan sebagai bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dalam hal ini Renstra BPBD Kabupaten Nunukan.

Dalam penyusunan Renstra PD sesuai ketentuan, perlunya menempatkan Renstra Provinsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra PD dalam hal ini BPBD Kabupaten Nunukan juga tidak terlepas dari Renstra BNPB sebagai pedoman dan acuan yang berkaitan dengan urusan kebencanaan. Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 124 bahwa Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD. Renja PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah, sebagaimana digambarkan berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Restra PD



BPBD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebencanaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan mengamanahkan bahwa BPBD Kabupaten Nunukan bertanggungjawab membantu Bupati Nunukan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, BPBD Kabupaten Nunukan fokus pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa urusan kebencanaan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

BPBD Kabupaten Nunukan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan teknis yang berkaitan dengan kebencanaan harus mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. BPBD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebencanaan tidak lagi merumuskan visi dan misi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa SKPD tidak lagi berkewajiban merumuskan visi misi SKPD. Visi misi Kepala daerah, dalam hal ini Bupati yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yaitu *“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”*. Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah, BPBD Kabupaten

Nunukan melaksanakan Misi Kepala Daerah yang ke-4 yaitu *“Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata”*.

Dalam mewujudkan misi Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Nunukan perlu menyusun Rencana Strategi dan Rencana Kerja tahunan yang berkaitan dengan program kebencanaan. Program kebencanaan disusun dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 8 bahwa “BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar”.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka BPBD Kabupaten Nunukan dipandang perlu untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029, sehingga sasaran Renstra yang telah dirumuskan dapat menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah selama 5 tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra BPBD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 02);
 37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025–2029 adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025–2029 adalah sebagai:

1. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Nunukan, penguatan peran aktif dari bidang kebencanaan dalam pelaksanaan perencanaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kabupaten Nunukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penulisan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.1.5 Mitra Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.1.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.1.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.2 Matriks Penahapan Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.1.2 Uraian Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.2.2 Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033, potensi terjadinya jenis bencana alam yang mengancam Kabupaten Nunukan antara lain adalah tanah longsor, banjir, Kebakaran Hutan, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawannya relatif kecil terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Salah satu dasar penguatan kebijakan dalam pelaksanaan kebencanaan termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 18 mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengatur kebencanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan. Dengan terbentuknya beberapa kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

a. Tugas Perangkat Daerah

BPBD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan

penanggulangan bencana. Bencana sebagaimana dimaksud adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 1, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

b. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas BPBD juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

c. Struktur Perangkat Daerah

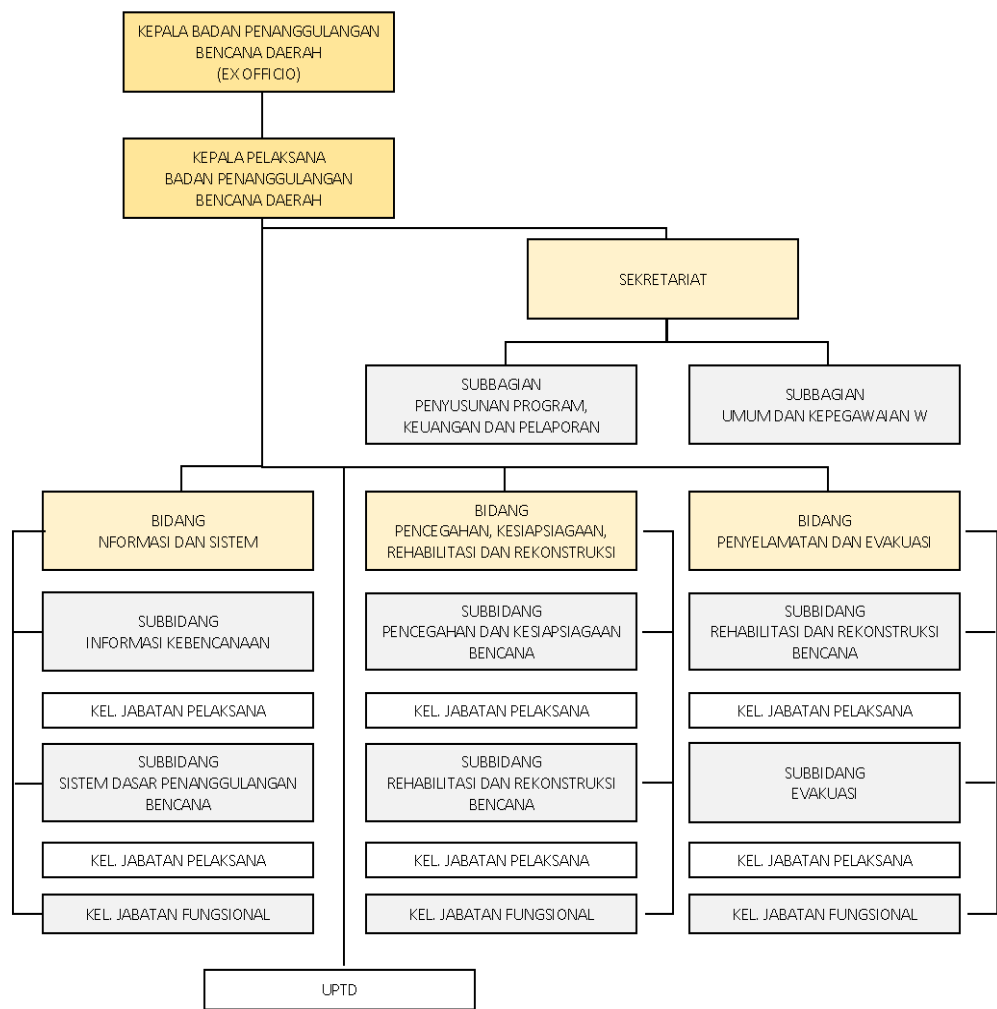
Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala Badan : secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretariat Badan, yang terdiri dari :

- a) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 4. Bidang Informasi dan Sistem, yang terdiri dari :
 - a) Subbidang Informasi Kebencanaan; dan
 - b) Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana.
- 5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
 - a) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
 - b) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
- 6. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi, yang terdiri dari :
 - a) Subbidang Penyelamatan; dan
 - b) Subbidang Evakuasi;
- 7. UPTD;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 9. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dari uraian diatas dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status

Sumber daya aparatur PNS, P3K dan Honorer berdasarkan kondisi terakhir per 01 Agustus 2025 berjumlah 84 orang, terdiri dari:

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 4 Orang
- Eselon IV : 8 Orang
- Pejabat fungsional : 3 Orang
- Staf PNS : 20 Orang
- Staf P3K : 6 Orang
- Staf P3K Paruh Waktu : 34 Orang
- Staf Honorer Lepas : 8 Orang

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Sumber Daya Manusia yang berdasarkan Pangkat Golongan dengan rincian sebagai berikut:

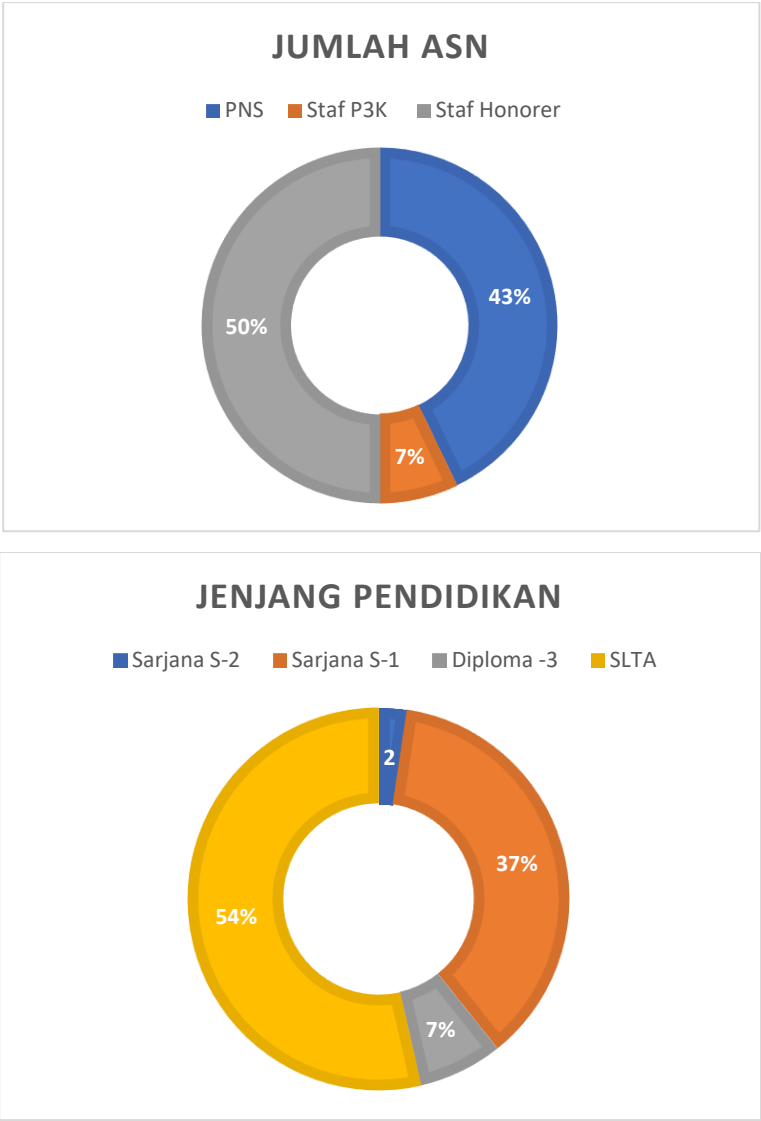
- Gol IV/b : 2 Orang
 - Gol IV/a : 3 Orang
 - Gol III/d : 5 Orang
 - Gol III/c : 4 Orang
 - Gol III/b : 1 Orang
 - Gol III/a : 11 Orang
- Gol II/d : 7 Orang
 - Gol II/c : 1 Orang
 - Gol II/b : 1 Orang
 - Gol II/a : 1 Orang
 - Gol IX : 2 Orang
 - Gol V: 4 Orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Sumber Daya Manusia yang berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- Sarjana S-2 : 2 Orang
- Sarjana S-1 : 31 Orang
- Diploma -3 : 6 Orang
- SMA : 45 Orang

Gambar 2.2
Diagram Jumlah ASN



b. Asset/Modal

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
I	Aset Bangunan Gedung				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2012	Pembelian	Baik
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1	2014	Pembelian	Baik
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	2023	Pembelian	Baik
II	Aset Tanah				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2002	Pembelian	Baik
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	2013	Hibah	Baik
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	2015	Hibah	Baik
III	Aset Kendaraan Dinas				
1	Pick Up	2	2011	Hibah	Baik
2	Pick Up	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	2014	Pembelian	Baik
4	Mobil Pemadam Kebakaran	1	2024	Pembelian	Baik
5	Sepeda Motor	2	2011	Hibah	Rusak Ringan
6	Sepeda Motor	1	2012	Pembelian	Baik
7	Sepeda Motor	4	2014	Pembelian	Baik
8	Sepeda Motor	3	2020	Pembelian	Baik
9	Sepeda Motor	3	2023	Pembelian	Baik
10	Sepeda Motor	4	2024	Pembelian	Baik
11	Perahu Long Boot / Long Boat	1	2023	Pembelian	Baik
12	480 Armada Rescue	1	2017	Pembelian	Rusak Ringan
13	Perahu Karet	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
14	Perahu Karet	1	2017	Hibah	Rusak Berat
15	Perahu kayu	2	2024	Pembelian	Baik
IV	Peralatan Kantor				
1	Lap Top	4	2012	Pembelian	Rusak Ringan
2	Lap Top	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
3	Lap Top	1	2018	Pembelian	Rusak Ringan
4	Lap Top	2	2019	Pembelian	Baik
5	Lap Top	2	2021	Pembelian	Baik
6	Lap Top	3	2022	Pembelian	Baik
7	Lap Top	5	2023	Pembelian	Baik
8	Lap Top	4	2024	Pembelian	Baik
9	A.C. Split	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
10	A.C. Split	4	2014	Pembelian	Rusak Ringan
11	A.C. Split	1	2016	Pembelian	Baik
12	A.C. Split	4	2024	Pembelian	Baik
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	Pembelian	Rusak Ringan
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	2017	Pembelian	Rusak Ringan
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2020	Pembelian	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2022	Pembelian	Baik
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2023	Pembelian	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2024	Pembelian	Baik
20	Lemari Kayu	2	2012	Pembelian	Rusak Ringan
21	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan
22	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2013	Pembelian	Rusak Ringan
23	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	2024	Pembelian	Baik
24	Lemari Es	1	2012	Pembelian	Baik
25	Meja 1/2 Biro	1	2010	Pembelian	Rusak Ringan
26	Meja 1/2 Biro	3	2011	Pembelian	Rusak Ringan
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
28	Meja 1/2 Biro	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan
29	Meja Kerja Kayu	3	2014	Pembelian	Rusak Ringan
30	Meja 1/2 Biro	1	2014	Pembelian	Rusak Ringan
31	Meja Kerja	1	2014	Pembelian	Rusak Ringan
32	Meja Kerja Besi/Metal	12	2014	Pembelian	Baik
33	Kursi Putar	5	2010	Pembelian	Rusak Ringan
34	Kursi Putar	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
37	Kursi Putar	4	2014	Pembelian	Rusak Ringan
38	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	2024	Pembelian	Baik
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	2024	Pembelian	Baik
40	Mesin Absensi	1	2018	Pembelian	Rusak Berat
41	LCD Projector/Infocus	1	2022	Pembelian	Baik
42	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)	1	2024	Pembelian	Baik
43	Sound System	1	2023	Pembelian	Baik
44	Sound System	1	2024	Pembelian	Baik
45	Brandkas	1	2014	Pembelian	Baik
46	Camera Electronic	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
47	Papan Pengumuman	4	2012	Pembelian	Baik
48	Dispenser	1	2012	Pembelian	Rusak Berat
49	Kipas Angin	4	2014	Pembelian	Rusak Berat
50	Hard Disk	1	2013	Pembelian	Rusak Berat
51	Sofa	2	2014	Pembelian	Baik
IV	Alat Pemenuhan				
	Kebutuhan Dasar				
1	Tenda Pleton	2	2011	Hibah	Rusak Ringan
2	Tenda Posko	1	2011	Hibah	Rusak Ringan
3	Tenda Regu	3	2011	Hibah	Rusak Ringan
4	Tenda Keluarga	5	2011	Hibah	Rusak Ringan
5	Tenda BNPB	8	2017	Hibah	Rusak Ringan
6	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	1	2011	Hibah	Rusak Berat
V	Alat Lainnya				
1	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	8	2020	Pembelian	Rusak Ringan
2	Pompa Portable	1	2020	Pembelian	Rusak Ringan
3	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10	2020	Pembelian	Rusak Ringan
4	Nozzlemeter Flowmeter	1	2020	Pembelian	Rusak Ringan
5	Masker	7	2020	Pembelian	Baik
6	Baju pengaman lainnya (dst)	7	2020	Pembelian	Rusak Ringan
7	Helm Dalmas	8	2020	Pembelian	Baik
8	Tempat Tidur Besi	22	2020	Pembelian	Rusak Berat

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Nunukan telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana periode tahun 2021 - 2024 antara lain :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten:

- Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- Tersusunnya Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:

- Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten
- Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten
- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten
- Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten
- Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Tersusunnya Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten

Adapun capaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Nunukan berdasarkan tujuan dan sasaran target Renstra 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Tercapainya kondisi aman, tertib dan tentram	INDEKS KETAHANAN DAERAH (Indikator Tujuan PD)	Nilai		√	0,39	0,42	0,40	0,42	0,43	0,20	0,20	0,20	0,48	0,56	51%	48%	50%	114%	130%
2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	PERSEN INDEKS PRIORITAS BENCANA (Indikator Sasaran Strategi PD)	Persen		√	42%	46%	47%	48%	50%	51%	42%	46%	60%	73%	121%	91%	98%	125%	147%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen Upaya Pelayanan Umum Perkantoran Dalam Sub Urusan Bencana	Persen			N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	67%	83%	100%	100%	N/A	67%	83%	100%	100%
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persen Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulangan Bencana (Indikator Program Penanggulangan Bencana)	Persen			N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	75%	75%	95%	100%	N/A	75%	75%	95%	100%

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020-2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	4.061.768.107	4.673.155.296	5.632.577.203	7.811.048.568	-	3.889.288.984	4.456.736.877	5.403.840.389	7.512.556.308	-	0,96	0,95	0,96	0,96	5.584.907.872	5.329.973.270
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	1.298.979.200	1.194.823.543	1.317.270.346	2.575.919.715	-	797.041.700	696.119.865	1.184.646.916	2.447.603.650	-	0,61	0,58	0,90	0,95	1.210.131.195	1.042.422.530

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan Kebencanaan. Berikut adalah kelompok sasaran layanan yang menjadi target utama selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan Kebencanaan

No	Jenis Layanan Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana dan Perangkat Daerah
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Aparatur dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak bencana
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Masyarakat yang ada di Kawasan Rawan Bencana dan Lembaga sub urusan kebencanaan

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh BPBD Kabupaten Nunukan. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, BPBD dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5. Mitra Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Nunukan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kebencanaan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi, dapat berjalan cepat, tepat, terpadu, dan menyeluruh. Berikut ini adalah rincian mitra

perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan BPBD :

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah

Ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas-dinas di lingkungan pemerintahan kabupaten yang memiliki fungsi teknis terkait penanggulangan bencana. BPBD bertindak sebagai **koordinator**.

Tabel 2.5

Mitra BPBD dengan Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Dinas Kesehatan	Peningkatan kapasitas ketangguhan Tenaga kesehatan terhadap bencana	Terwujudnya pusat layanan kesehatan yang aman dan tangguh terhadap bencana
2	Dinas PUPR dan Dinas Perkim	Pembangunan infrastruktur tahan bencana, drainase, dan perumahan relokasi	Terwujudnya tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana
		Rekonstruksi rumah, jembatan, jalan.	Terlaksanya Perbaikan fasilitas umum akibat bencana
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Penyediaan, pengelolaan, dan distribusi logistik pangan	Terwujudnya kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat bencana
4	Dinas Sosial	Penyediaan barang pasokan kebutuhan dasar	Terlaksananya layanan sosial pada korban bencana
5	Dinas Lingkungan Hidup	Rehabilitasi hutan, DAS, mitigasi perubahan iklim	Pengelolaan risiko melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
6	Dinas Pendidikan	Pelayanan pendidikan aman bencana	Terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan tangguh terhadap bencana
7	Dinas Pariwisata	Pelayanan daerah wisata tangguh bencana	Terwujudnya pariwisata tangguh bencana
8	Disdukcapil	Pelayanan data kependudukan	Tersusunnya data kependudukan di wilayah rawan bencana
9	BKAD	Penyusunan dan pengalokasian anggaran	Terwujudnya dukungan pendanaan terhadap penanggulangan bencana
10	Bappedalitbang	Integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis risiko bencana
11	Inspektorat Daerah	Layanan pengawasan internal	Pengawasan akuntabilitas penggunaan anggaran bencana

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
12	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	Layanan pemulihan ekonomi masyarakat	Terwujudnya kestabilan ekonomi di wilayah terdampak
13	Damkar dan Satpol PP	Sinergi dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terwujudnya Ketemtraman dan Keteriban Umum sub Urusan Bencana
14	TNI dan Polri	Layanan kedaruratan penanganan bencana	Dukungan pengamanan, evakuasi, distribusi bantuan

2. Mitra Non-Pemerintah dan Swasta

Kemitraan ini mencakup organisasi, perusahaan, dan kelompok yang memberikan dukungan non-struktural dan sumber daya.

- **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / Organisasi Nirlaba:** Seperti PMI, organisasi kemanusiaan, dan relawan lokal yang membantu dalam pendistribusian bantuan, layanan psikososial, dan kegiatan kesiapsiagaan masyarakat.
- **Perusahaan Swasta / BUMN/BUMD:** Terlibat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyediakan logistik, alat berat (untuk evakuasi atau pembersihan), hingga dukungan pendanaan.
- **Akademisi (Perguruan Tinggi):** Memberikan kajian risiko bencana (KRB), peta rawan bencana, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penelitian.

3. Mitra Berbasis Komunitas dan Masyarakat

Kemitraan ini sangat penting dalam fase prabencana dan tanggap darurat awal (respon cepat) karena mereka adalah pihak pertama di lokasi kejadian.

- **Relawan Bencana Lokal:** Seperti Taruna Siaga Bencana (Tagana), Relawan BPBD (misalnya, Tim Reaksi Cepat/TRC), dan organisasi pencinta alam.
- **Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana/Keltana):** Unit masyarakat paling dasar yang sudah dibekali pengetahuan dan rencana aksi untuk menghadapi bencana secara mandiri.
- **Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama:** Berperan dalam menggerakkan kesadaran dan mengkoordinasikan bantuan di tingkat lingkungan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Nunukan memiliki tantangan

yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan. Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi Rawan bencana	Kurangnya pemahaman masyarakat di kawasan rawan bencana terhadap informasi dan edukasi kebencanaan
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi di kawasan rawan bencana sesuai dengan kajian dokumen KRB	Kurangnya keingintahuan masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten
3	Keterbatasan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum optimalnya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Minimnya Peralatan Penyelamatan Diri yang didistribusikan ke Warga Negara di kawasan rawan bencana
4	Kurangnya pelaksanaan gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Belum optimal pelaksanaan simulasi Kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai SOP	Belum optimalnya keterlibatan instansi lain dalam pelaksanaan simulasi gladi kesiapsiagaan bencana
5	Belum ada pelatihan keluarga ketangguhan bencana	Perlunya dilaksanakan Pelatihan keluarga tanggap bencana	Kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana
6	Kurangnya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
7	Kurang optimalnya pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	Belum optimalnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan	Minimnya jumlah pelatihan yang melibatkan personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	Cepat (TRC) Bencana Kabupaten	Bencana (TRC PB) Kabupaten untuk penanganan awal darurat bencana	(TRC PB) Kabupaten yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
8	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat	Belum ada dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Belum maksimalnya keterlibatan instansi/lembaga terkait dalam penanganan tanggap darurat
9	Belum optimalnya penyampaian informasi dalam penanganan bencana	Belum optimalnya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap bencana.	Kurangnya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
10	RPJMD belum berbasis pengulangan bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) masih dalam tahap proses Sah dan Legal	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RPJMD Kabupaten Nunukan masi dalam tahap proses Penyelarasan
11	Rendahnya SDM aparatur dan masyarakat tentang kebencanaan	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap aparatur di wilayah rawan bencana	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana
12	Tingginya intesitas bencana yang mengakibatkan korban yang terdampak	Keterbatasan kapasitas personil dalam pelaksanaan respon cepat	Keterbatasan sarana dan prasarana di kecamatan yang merupakan wilayah rawan bencana
		Belum tersedianya peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Lokasi bencana yang sulit dijangkau dalam waktu cepat
		Belum optimalnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13	Belum adanya standar dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum tersusunnya Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten yang melibatkan instansi terkait
14	Minimnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan	Masih kurang kegiatan peningkatan kapasasitas SDM dalam penanganan darurat bencana	Perlunya dukungan peningkatan kapasitas relawan dalam

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
	keadaan darurat Kabupaten		penanganan darurat bencana
15	Belum tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang lengkap dan memadai	Belum optimalnya penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	Kurangnya referensi dalam penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten
16	Belum optimalnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kurangnya maksimalnya upaya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga dan kemitraan yang belum memahami kewajiban dalam Penanggulangan Bencana
17	Belum Tersedianya Sistem Informasi Kebencanaan	Belum optimalnya penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan	Masih kurangnya ketersediaan sumber data realtime dari instansi terkait
18	Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum terlaksannya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga yang belum mendapatkan pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
19	Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnnya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnnya aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi dari Instansi terkait
20	Kurangnya SDM Aparatur dalam penyusunan dokumen pasca bencana	Belum terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Masih kurangnya kempuan teknis Aparatur lintas sektor dalam penyusunan dokumen pasca bencana
21	Kurangnya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksannya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksannya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten lintas sektor
22	Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
23	Belum maksimalnya pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Belum tersedianya data terpilah di lokasi daerah rawan bencana
24	Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan urusan kebencanaan
25	Belum tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum tersedianya data dukung bahan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
26	Belum tersedianya Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan analisis permasalahan, BPBD menghadapi berbagai tantangan serius dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari aspek kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, hingga kesiapsiagaan operasional. Rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya sistem peringatan dini berbasis teknologi, serta lemahnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana di daerah ini.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti alih fungsi lahan, deforestasi, perubahan iklim global, serta keterbatasan integrasi isu kebencanaan dalam pembangunan lintas sektor memperbesar risiko kejadian bencana. Minimnya koordinasi antar sektor, lemahnya regulasi daerah yang tidak adaptif terhadap dinamika risiko baru, serta rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim semakin memperumit kondisi. Terbatasnya infrastruktur logistik dan jalur distribusi di wilayah perbatasan serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi memperlihatkan perlunya reformasi menyeluruh baik dari sisi perencanaan, penguatan kapasitas, inovasi teknologi, maupun pendekatan berbasis komunitas.

Melihat kompleksitas tantangan ini, BPBD perlu menyusun strategi komprehensif yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, pemanfaatan teknologi berbasis risiko, penyelarasan regulasi, serta pengarusutamaan

adaptasi perubahan iklim ke dalam seluruh rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana di masa depan dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 2.7

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 “PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA”	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Nunukan	Penguatan kelembagaan (Tim Terpadu)	Belum sinerginya lembaga pendukung
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebencanaan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Informasi dan Kesiapsiagaan	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan
			Peningkatan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Penanganan Bencana	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan
			Peningkatan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Penanganan Pasca Bencana	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan

Tabel 2.8

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perencanaan Pembangunan Daerah melalui RTRW dan	Kabupaten Nunukan	terintegrasi hasil Kajian Risiko Bencana (KRB)	Belum terintegrasi	Belum diselaraskan	Upaya Penyelarasan

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
RDTR yang terintegrasi dengan hasil kajian risiko bencana melalui Dokumen KRB Kabupaten Nunukan		Kabupaten Nunukan dalam RTRW dan RDTR secara terstruktur			
Meningkatnya kapasitas pemerintah yang saling sinergi dalam perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana	Kabupaten Nunukan	Pemerintah yang saling bersinergi dalam perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana	Belum bersinergi	Ego Sektoral	Penguatan Kelembagaan
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman di daerah rawan bencana	Kabupaten Nunukan	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman di daerah rawan bencana yang lebih berasas pengurangan risiko bencana (PRB)	Belum Berasaskan Pengurangan Resiko Bencana	Kurangnya pengawasan	Adanya Peta wilayah Rawan Bencana
Perencanaan Pembangunan infrastruktur yang resilien atau berbasis pengurangan risiko bencana	Kabupaten Nunukan	Pelaksanaan pengembangan perencanaan infrastruktur yang resilien	Belum berbasis pengurangan Risiko Bencana	Tidak mempunyai master plan daerah	Upaya pengurangan resiko bencana

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu strategis ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang memengaruhi upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.9

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DAS merupakan aset ekologis dan sosial ekonomi penting bagi daerah, menjadi sumber air, pangan, dan energi — potensi ini perlu dikelola lintas wilayah.	Koordinasi antar OPD dan lintas daerah masih lemah, serta belum ada sistem terpadu untuk mitigasi bencana berbasis DAS.	Menyentuh aspek keberlanjutan lingkungan (daya dukung, daya tampung, konservasi, adaptasi terhadap perubahan iklim).	Relevan dengan upaya dunia menjaga keseimbangan hidrologi dan mitigasi perubahan iklim.	Sesuai arah kebijakan pemerintah melalui program pemulihan DAS dan penguatan ketahanan lingkungan.	Menyangkut koordinasi lintas wilayah administrasi dalam satu sistem DAS (hulu–tengah–hilir) yang seringkali berbeda kabupaten/kota.	Tata Kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) belum terpadu, belum komprehensif, belum terkoordinasi dan belum multistakeholder.
BPBD memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan yang bisa dikembangkan menjadi pusat pelatihan kebencanaan daerah.	Kurangnya pelatihan sistematis dan terbatasnya SDM ahli menyebabkan respons dan koordinasi belum maksimal.	Kesiapan SDM menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.	Menuntut SDM yang kompeten dan adaptif terhadap tren kebencanaan global.	Didukung kebijakan pemerintah pusat untuk profesionalisasi ASN dan relawan kebencanaan.	Diperlukan penguatan kapasitas lokal sesuai potensi dan risiko spesifik daerah.	Kompetensi dan keterampilan SDM Kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan dengan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.
Tersedia SDM, relawan, sarana prasarana, dan jejaring pentahelix.	Keterbatasan kapasitas SDM, sarana, koordinasi, dan anggaran tanggap darurat.	Perubahan iklim, tata ruang tidak aman, degradasi lingkungan, dan ketimpangan adaptasi.	SFDRR, perubahan iklim, teknologi peringatan dini.	RIPB, RPJMN, kebijakan ICS, desa tangguh bencana.	Bencana lokal meningkat, koordinasi lintas daerah belum optimal.	Upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal.
Daerah memiliki modal teknologi dan jejaring akademik	Data dan sistem belum terintegrasi, masih manual, dan	Pengelolaan informasi lingkungan dan risiko adalah dasar	Transformasi digital dan	Kebijakan “Satu Data Indonesia” dan digitalisasi SPBE.	Kesenjangan infrastruktur dan kapasitas daerah	Sistem informasi kebencanaan dan sistem

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan degan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
yang bisa dioptimalkan untuk sistem informasi kebencanaan terpadu.	belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan cepat.	pembangunan berkelanjutan.	kolaborasi data bencana dunia.		dalam sistem data bencana.	pemulihan pasca bencana yang belum komprehensif.
BPBD memiliki kewenangan memanfaatkan data risiko bencana, kearifan lokal, dan koordinasi lintas OPD untuk memastikan pembangunan aman bencana.	Masih ada pembangunan infrastruktur di daerah rawan bencana, belum ada sinergi kuat antara BPBD dan instansi teknis dalam perencanaan ruang.	KLHS menekankan integrasi antara pembangunan dan daya dukung lingkungan, sehingga PRB harus menjadi bagian dari analisis kebijakan dan tata ruang daerah.	Tuntutan pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.	Arah kebijakan nasional mendorong pembangunan <i>resilient</i> .	Tekanan lokal akibat urbanisasi, eksploitasi lahan, dan lemahnya pengawasan ruang di daerah rawan bencana.	Tata kelola pemanfaatan ruang dan pemukiman masyarakat, serta pembangunan inftrastruktur dan sarana-prasarana/fasilitas publik belum berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kapasitas internal perangkat daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, maupun lemahnya koordinasi lintas sektor. Isu-isu seperti minimnya aparatur yang tersertifikasi, kurangnya edukasi kebencanaan, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor, hingga perencanaan pembangunan yang belum ramah lingkungan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung strategi mitigasi dan adaptasi bencana. Selain itu, ancaman dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin memperparah kerentanan daerah terhadap bencana.

Isu strategis yang muncul menggarisbawahi pentingnya penguatan kebijakan berbasis ekologi, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana, serta perlunya kolaborasi multipihak yang lebih solid. Ketidadaan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan ketimpangan peran antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam membangun ketangguhan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan harus fokus pada integrasi lintas sektor, pelibatan masyarakat secara lebih luas, serta pengembangan sistem informasi dan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah, terukur, dan operasional untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan untuk memberikan arah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Nunukan mengacu pada Visi Bupati Kabupaten Nunukan, yaitu: *“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri”* yang diturunkan dalam Misi ke-4 yaitu *“Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata”*. Dari Visi dan Misi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif terhadap risiko bencana, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.

3.1.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Nunukan adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana yang dapat dicapai melalui pemenuhan 7 prioritas:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Nunukan adalah :

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebencanaan yang dapat dicapai melalui pemenuhan 6 pilar:
 1. Kelembagaan
 2. Sumber Daya Aparatur
 3. Kebijakan

4. Pendanaan
 5. Teknis Operasional
 6. Kepemimpinan
- 2) Meningkatkan Nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dapat dicapai melalui pemenuhan 5 komponen:
1. Perencanaan Kinerja
 2. Pengukuran Kinerja
 3. Pelaporan Kinerja
 4. Evaluasi Kinerja
 5. Capaian Kinerja

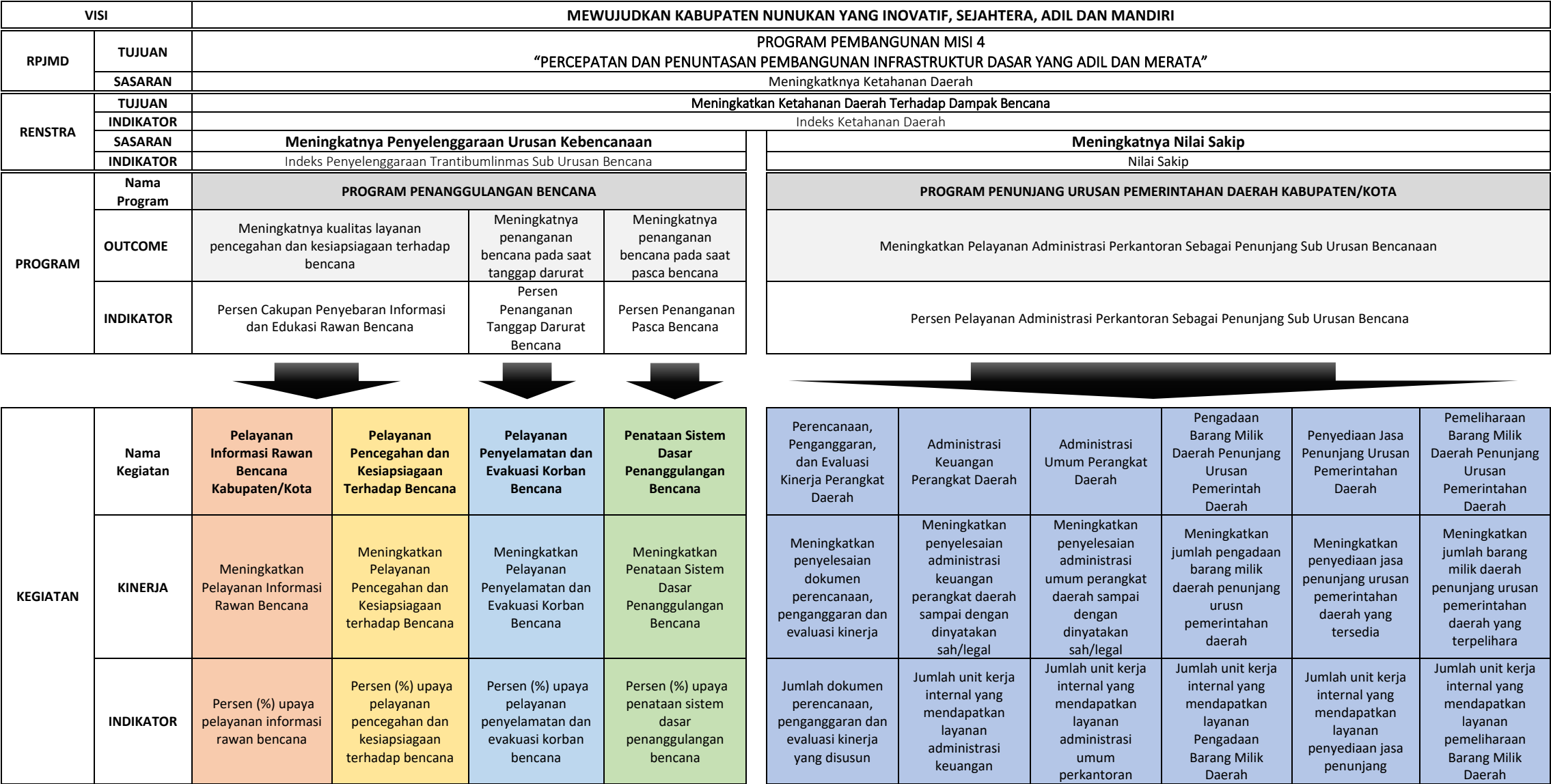
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *cascading* kinerja dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *cascading* kinerja dan pohon kinerja BPBD, yang merupakan alat untuk memetakan strategis dari level organisasi yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara vertikal, hingga ke tingkat individu pegawai, untuk menciptakan keselarasan serta hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur sebagai mana tergambar pada Gambar 3.1.

3.1.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029

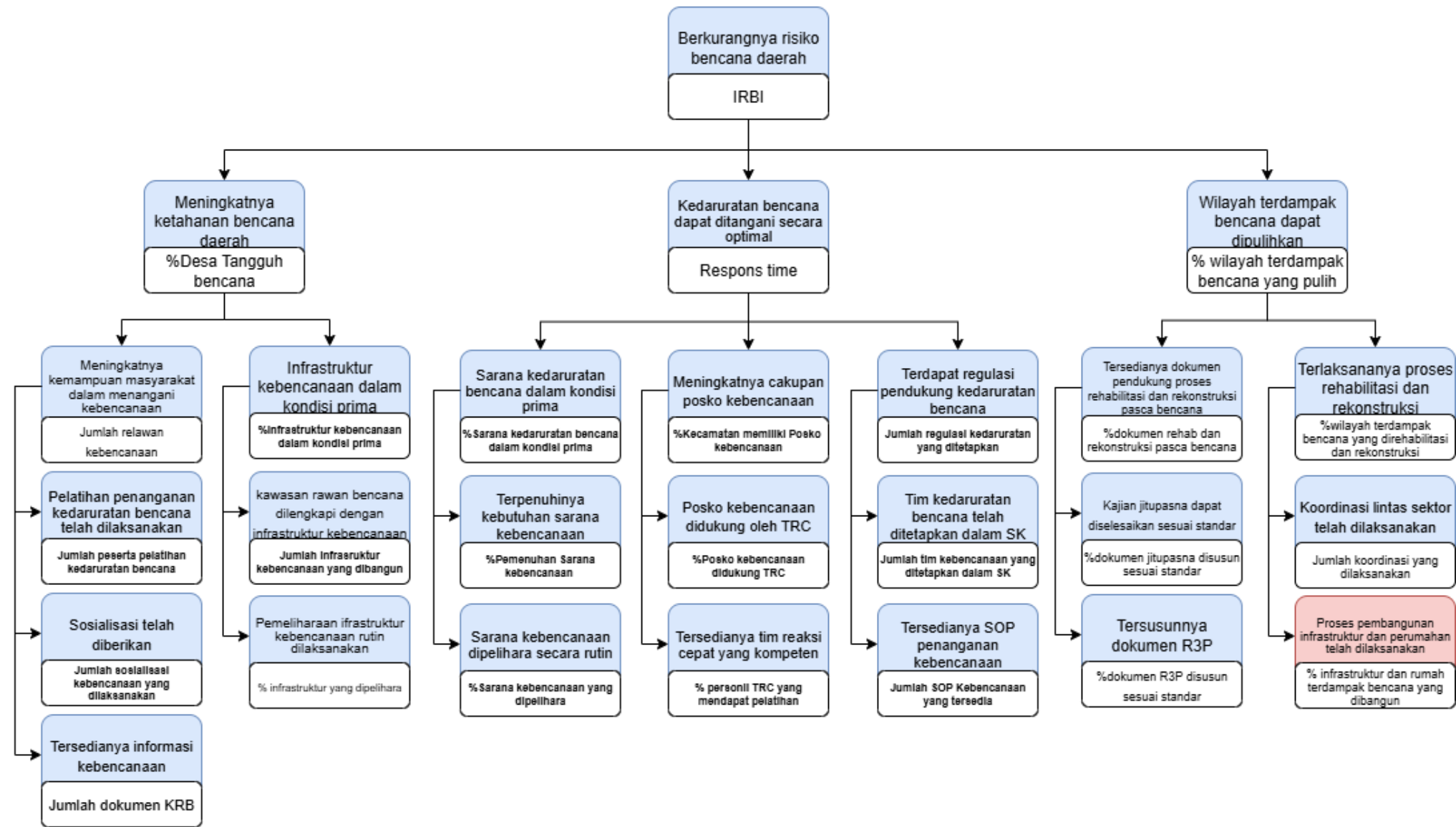
Perencanaan strategi yang menguraikan tujuan utama, sasaran spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, dan sasaran kinerja terukur yang digunakan untuk mencapai pencapaian sasaran dan tujuan secara keseluruhan. Matriks ini berfungsi untuk menyelaraskan upaya organisasi dan menyatukan kemajuan dalam mencapai visi dan misi, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3.1.

Gambar 3.1

Penyajian Cascading Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2
Penyajian Pohon Kinerja Renstra Perangkat Daerah



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68
Pelayanan Informasi Rawan bencana		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Kebencanaan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	N/A	51	52	53	54	55	56
Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana											
Pelayanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana											
		Meningkatkan Nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBD. Selain itu arah kebijakan Renstra BPBD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. BPBD memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan bencana	Membangun dasar Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk upaya adaptasi pada perubahan iklim	• Perkuatan kebijakan dan kelembagaan • Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu • Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	Prioritas 1, 2 dan 3 Indeks Ketahanan Daerah
2	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	Membangun dasar Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan.	• Penanganan tematik kawasan rawan bencana • Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Prioritas 4 dan 5 Indeks Ketahanan Daerah
3	Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	Membangun dasar Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.	• Perkuatan kesiapsiagaan dan pengangan darurat bencana • Pengembangan sistem pemulihan bencana	Prioritas 5 dan 6 Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3.3

Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Optimalisasi upaya pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana.	Tata Kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) belum terpadu, belum	Meningkatnya Penyelenggara n Urusan Kebencanaan	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	• Perkuatan kebijakan dan kelembagaan • Pengkajian risiko dan

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Upaya penurunan wilayah yang terpapar bencana	komprehensif, belum terintegrasi, belum terkoordinasi dan belum multistakeholder.		Kabupaten Nunukan	perencanaan terpadu • Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik • Penanganan tematik kawasan rawan bencana • Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana • Perkuatan kesiapsiagaan dan pengangan darurat bencana • Pengembangan sistem pemulihan bencana
Meningkatnya kualitas SDM Kebencanaan Daerah	Kompetensi dan keterampilan SDM Kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan dengan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.			
kurangnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal.			
minimnya upaya penanganan kesiapsiagaan dan darurat bencana.				
masyarakat yang kurang terfasilitasi sistem informasi kebencanaan.	Sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan pasca bencana yang belum komprehensif.			
kurangnya upaya pemulihan pasca bencana yang komprehensif.				
belum tercapainya pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).	Tata kelola pemanfaatan ruang dan pemukiman masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana/fasilitas publik belum berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).			

3.2.2 Matriks Penahapan Renstra PD

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh BPBD. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kec. Krayan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kec. Lumbis Pansiangan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kec. Lumbis	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kec. Sembakung Atulai	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Kec. Sembakung
Pengelolaan Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam di Kec. Sebatik	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam di Kec. Nunukan	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam di Kec. Krayan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam di Kec. Sembakung	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam di Kec. Lumbis
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kec. Sembakung	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kec. Krayan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kec. Lumbis	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kec. Sembakung Atulai	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Kec. Sebatik
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi Kekeringan dan Karhutlah	Penyusunan Rencana Kontijensi Tanah Longsor	Penyusunan Rencana Kontijensi Angin Puting Beliung	Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir	Penyusunan Rencana Kontijensi Kekeringan dan Karhutla
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Pengendalian	Terhadap Bencana	Bencana	Terhadap Bencana	Pengendalian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kec. Lumbis	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kec. Sebuku	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kec. Sembakung	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kec. Nunukan	Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di Kec. Sebatik
Respon Cepat Darurat Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kec. Tulin Onsoi dan Sebuku Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan di Nunukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kec. Tulin Onsoi dan Sebuku Peningkatan Kapasitas SDM	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kec. Sembakung dan Sembakung Atulai Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan di Nunukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kec. Sembakung dan Sembakung Atulai	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kec. Sebuku dan Sei Manggaris Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan di Nunukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kec. Sebuku dan Sei Manggaris	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kec. Sebatik Tengah dan Sebatik Utara Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan di Nunukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kec. Sebatik Tengah dan Sebatik Utara	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di Kec. Sebatik dan Sebatik Barat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan di Nunukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kec. Sebatik dan Sebatik Barat

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aparatur Penanggulangan Bencana di Nunukan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di Nunukan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di Nunukan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di Nunukan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana di Nunukan
Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana
Koordinasi penanganan Pascabencana	Koordinasi penanganan Pascabencana	Koordinasi penanganan Pascabencana	Koordinasi penanganan Pascabencana	Koordinasi penanganan Pascabencana
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana di Nunukan	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana di Nunukan	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana di Nunukan	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana di Nunukan	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana di Nunukan
Penguatan Kelembagaan Bencana di Nunukan	Penguatan Kelembagaan Bencana di Nunukan	Penguatan Kelembagaan Bencana di Nunukan	Penguatan Kelembagaan Bencana di Nunukan	Penguatan Kelembagaan Bencana di Nunukan
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Nunukan	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Nunukan	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Nunukan	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Nunukan	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di Nunukan

BAB IV**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD****4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan BPBD. Program dan kegiatan BPBD tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi BPBD.

Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.530		14.400		15.280		15.030		15.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.770		8.910		8.990		9.070		9.190	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persen tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	8.770	100	8.910	100	8.990	100	9.070	100	9.190	BPBD
1.05.03 – PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.760		5.490		6.290		5.960		5.810	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persen)	100	100	100	2.580	100	2.280	100	3.080	100	2.730	100	2.580	BPBD
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persen penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	1.760	100	1.790	100	1.790	100	1.810	100	1.810	BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persen Penanganan Pasca Bencana (Persen)	100	100	100	1.420	100	1.420	100	1.420	100	1.420	100	1.420	BPBD
TOTAL KESELURUHAN					14.530		14.400		15.280		15.030		15.000	

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 “PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA” Meningkatkannya Ketahanan Daerah	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana	Meningkatnya Nilai Sakip	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencanaan		Indeks Ketahanan Daerah		
					Nilai Sakip		
				Meningkatkan penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatkan penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatkan penyelesaian administrasi umum perangkat daerah sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Meningkatkan jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatkan jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebencanaan			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persen Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Laporan pelayanan informasi rawan bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	SPM/ LPPD
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD
				Meningkatkan Pelayanan Pencegahan	Jumlah Laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

				dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM/ LPPD		
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD		
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD		
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD		
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD		
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD		
					Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		Persen Penanganan Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
						Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan	Jumlah Laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

			Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM/ LPPD
				Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SPM/ LPPD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		Persen Penanganan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatkan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	SPM
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	SPM
				Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

					Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	<i>SPM</i>
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.730.619.351,48		13.120		12.870		13.520		13.260		13.060	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	Persen	N/A	100	7.680.532.798	100	8.780	100	8.780	100	8.780	100	8.780	100	8.780	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	N/A	5	123.639.960	5	220	5	220	5	220	5	220	5	220	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	62.608.860	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.325.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	11.014.100	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	17.122.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	1	20.570.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Unit	N/A	4	5.058.519.754	4	5.310	4	5.310	4	5.310	4	5.310	4	5.310	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	42	5.051.689.454	42	5.300	42	5.300	42	5.300	42	5.300	42	5.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	1	6.830.300	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	Unit	N/A	4	550.151.283	4	840	4	840	4	840	4	840	4	840	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10	350.112.497	5	420	5	420	5	420	5	420	5	420	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	6	104.505.086	6	170	6	170	6	170	6	170	6	170	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	29.729.700	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	2	65.804.000	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	N/A	4	339.019.255	4	550	4	550	4	550	4	550	4	550	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	4	199.744.500	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	5	139.274.531	5	150	5	150	5	150	5	150	5	150	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	224	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Unit	N/A	4	1.335.837.056	4	1.350	4	1.350	4	1.350	4	1.350	4	1.350	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	127.754.736	12	130	12	130	12	130	12	130	12	130	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.208.082.320	12	1.220	12	1.220	12	1.220	12	1.220	12	1.220	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	N/A	4	273.365.490	4	510	4	510	4	510	4	510	4	510	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	20	245.725.490	20	350	20	350	20	350	20	350	20	350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	27.640.000	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persen Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	6.974.037.703	100	1.980	100	1.730	100	2.380	100	2.120	100	1.920	
		Persen Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	568.609.570	100	1.310	100	1.310	100	1.310	100	1.310	100	1.310	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persen Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	507.439.281	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.050	
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelayanan informasi rawan bencana	Laporan	N/A	1	46.223.653	1	160	1	160	1	560	1	160	1	160	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	190	40	46.223.653	120	160	120	160	120	160	120	160	120	160	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	400	0	-	0	-	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	N/A	1	6.927.814.050	1	1.820	1	1.570	1	1.820	1	1.960	1	1.760	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	159.780.980	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	0	37	6.291.823.000	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana	Orang	50	50	16.219.500	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		<i>prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>															
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	30	-	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0	1	18.661.370	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	
	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>Orang</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>31.625.000</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>10</i>	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>60</i>	
	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	-	1	250	0	-	1	250	0	-	1	250	
	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>229.394.030</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya															
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	450	0	-	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	20	40	180.309.820	60	180	60	180	60	180	60	180	60	180	
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Laporan	N/A	1	568.609.570	1	1.310	1	1.310	1	1.310	1	1.310	1	1.310	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	3	49.168.000	3	150	3	150	3	150	3	150	3	150	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	23	10	185.145.000	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	0	0	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	40	79.413.810	60	150	60	150	60	150	60	150	60	150	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	191	8	216.086.000	50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	3	3	38.796.760	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Laporan	N/A	1	507.439.281	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	1	1.050	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	9.162.000	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	17.380.000	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	0	1	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	1	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	0	20	68.357.270	30	150	30	150	30	150	30	150	30	150	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian	Orang	0	15	38.231.310	20	75	20	75	20	75	20	75	20	75	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)															
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	1	42.801.000	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	1	1	94.767.697	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	0	1	64.827.104	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	89.079.530	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	1	78.728.220	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Pascabencana (R3P) Kab/Kota	sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun															
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokuman	0	1	4.105.150	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	SPM/LPPD
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM/LPPD
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	SPM/LPPD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	SPM
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	SPM
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebencanaan oleh BPBD diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja BPBD.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis BPBD dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama BPBD terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	Sumber data BNPB
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	N/A	51	52	53	54	55	56	Sumber data BPBD
3	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Sumber data BPBD

4.2.2 Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, BPBD telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 28 Agustus 2025
Kepala Pelaksana,



ARIEF BUDIMAN, S.Pt. M.Si
NIP. 19740516 200502 1 002